

**ANALISIS PENGARUH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (APBD) TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2011-2015**

Adrika Fardisa Maskuna*

Abd. Kodir Djaelani **

M. Khoirul ABS ***

Email: adrikafaradisamaskuna@yahoo.co.id

Universitas Islam Malang

ABSTRACT

The purpose of this research is to know the influence of regional budget and expenditure to the financial performance of local government of Blitar City. Subjects in this study is the Local Government Budget Realisasi Report Blitar city obtained from the budget revenues and expenditure area in 2011-2015, the data source used is secondary data obtained from data or records from the results of the examiner reports on financial statements are arranged archives or books obtained from the Regional Financial and Asset Management Board of Blitar City. The research used descriptive quantitative approach. The result of the research shows that the budget of income and expenditure partially have a significant influence on the Regional Financial Performance of Blitar City.

Keywords: Revenue Budget, Regional Expenditure, Financial Performance

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. APBD merupakan rencana kerja pemerintah daerah dinyatakan dalam satuan moneter (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun). Melalui APBD dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran merupakan suatu laporan yang memuat penerimaan dan pembelanjaan negara / daerah. Di dalam laporan tersebut ditetapkan target-target yang hendak dicapai pemerintah dalam penerimaan pendapatan dan pengeluaran. Kebijakan-kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah dituangkan di dalam anggaran tersebut. Setiap tahunnya proses penyusunan anggaran sering kali menjadi isu sorotan utama masyarakat. Karena APBN selalu menjadi indikator perekonomian negara selama tahun berikutnya. Sehingga, APBN selalu menjadi suatu dasar apakah masyarakat akan semakin sejahtera atau tidak. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukanlah pengetahuan proses penyusunan APBN dan APBD yang efektif dan efisien. Melihat adanya pengaruh yang sangat kuat terhadap perkembangan sebuah daerah maka penelitian ini sengaja dilakukan dengan judul **“ANALISIS PENGARUH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2011-2015”**.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka dalam penelitian ini dapat di susun rumusan masalah adalah bagaimana pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Blitar?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penulis antara lain adalah untuk mengetahui pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Blitar.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Berdasarkan pasal 5 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 selain menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia juga menggunakan beberapa asas, antara lain :

- a. Asas Desentralisasi
- b. Asas Dekonsentrasi
- c. Asas Tugas Pembantuan (Medebewind)

2. Tahapan Penyusunan Anggaran

Menurut Deddi Nordiawan (2006:79) beberapa tahapan penyusunan anggaran adalah:

- a. Penetapan Strategi Organisasi (visi dan misi)
- b. Pembuatan Tujuan
- c. Penetapan Aktivitas
- d. Evaluasi dan Pengambilan Keputusan

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

4. Prinsip Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Permendagri No.52 tahun 2016 Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 didasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerinta yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- c. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jawal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD.
- e. Partisipasif, dengan melibatkan masyarakat
- f. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundangan-undangan daerah lainnya.

5. Kebijakan penyusunan APBD

Menurut Permendagri No.52 Tahun 2016 Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016, kebijakan yang perlu mendapatkan perhatian Pemerintah daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

b. Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

1. Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a) Belanja Pegawai
- b) Belanja Bunga
- c) Belanja Subsidi
- d) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
- e) Belanja Bagi Hasil Pajak
- f) Belanja Bantuan Keuangan
- g) Belanja Tidak Terduga

2. Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran belanja langsung dalam APBD
- b) Belanja Pegawai
- c) Belanja Barang dan Jasa
- d) Belanja Modal
- e) Surplus/Defisit APBD

c. Pembiayaan Daerah

- 1. Penerimaan Pembiayaan
- 2. Pengeluaran Pembiayaan
- 3. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

6. Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja Keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas perusahaan (Jumingan 2006:239). Menurut Nurlan Darise (2008:51) Kinerja Keuangan adalah realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual.

Berdasarkan definisi Kinerja Keuangan yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan adalah gambaran kondisi keuangan pada periode tertentu yang diukur dengan beberapa indikator dan disusun berdasarkan basis akrual.

7. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan

Menurut Jumingan (2006: 239) berkaitan dengan pengukuran Kinerja Keuangan mengandung beberapa tujuan :

- a. Mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan perusahaan terutama kondisi likuiditas, kecukupan modal dan profitabilitas yang dicapai dalam tahun berjalan maupun tahun sebelumnya.
- b. Mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan semua aset yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien.

Berdasarkan tujuan pengukuran Kinerja Keuangan yang dipaparkan di atas dapat dilihat bahwa pengukuran Kinerja Keuangan sangat penting dalam menilai efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset yang dimiliki. Pengukuran Kinerja Keuangan juga mampu mengetahui

kekuatan dan kelemahan Kinerja Keuangan suatu instansi, serta mengevaluasi Kinerja Keuangan dan menetapkan tujuan untuk kinerja masa datang.

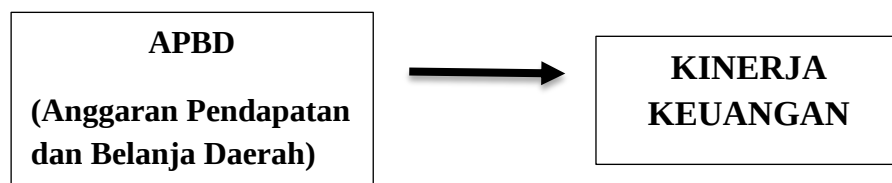
8. Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan

Wayne C. Parker (1996:3) dalam Arta Sadjiarto (2000) menyebutkan lima manfaat dilakukannya pengukuran Kinerja Keuangan, yaitu :

- a. Pengukuran Kinerja Keuangan meningkatkan mutu pengambilan keputusan.
- b. Pengukuran Kinerja Keuangan meningkatkan akuntabilitas internal.
- c. Pengukuran Kinerja Keuangan meningkatkan akuntabilitas publik.
- d. Pengukuran Kinerja Keuangan mendukung perencanaan strategi dan penetapan tujuan.
- e. Pengukuran Kinerja Keuangan memungkinkan suatu entitas untuk menentukan sumberdaya secara efektif.

9. Kerangka Konseptual

Berdasarkan penelitian terdahulu dan tinjauan teori yang sudah dijabarkan di atas maka peneliti menyusun konseptual sebagai berikut:



Gambar. 2.1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka konseptual yang disusun diatas, jadi fokus penelitian ini terletak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencari pengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Blitar.

METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Indriantoro dan Supomo (2014:88) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh peneliti dari subyek berupa: individu, organisasional, industri atau perspektif yang lain. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Jl. Merdeka No.105 Kota Blitar Jawa Timur. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2017 sampai Juli 2017.

2. Objek Penelitian

Beberapa hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan obyek penelitian (Ratna, 2010: 16), yaitu sebagai berikut:

- a. Obyek penelitian harus sesuai dengan latar belakang kita (peneliti), baik latar belakang social maupun akademis (khusus untuk penelitian individual).
- b. Obyek harus merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peneliti sehingga penelitian menjadi menarik.

- c. Jangan meneliti atau mengkaji bidang penelitian orang lain. Alasannya, selain melanggar etika akademis, kita nantinya juga dianggap tidak memiliki kompetensi terhadap bidang bersangkutan.
- d. Obyek penelitian, besar atau kecil ada di sekitar kita, di sekitar kehidupan manusia.
- e. Obyek penelitian disarankan jangan berada di tempat kerja atau tempat berdomisili karena sangat sulit untuk mendapatkan obyektivitas.

3. Definisi Operasional Variabel

Definisi dari operasional variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2010:58)

Definisi dari operasional variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2010:58)

- a. APBD adalah suatu anggaran daerah yang dinyatakan dalam satuan uang dan memiliki unsur – unsur sebagai berikut :
 - 1. Rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci.
 - 2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya – biaya sehubungan dengan aktivitas – aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran – pengeluaran yang dilaksanakan.
 - 3. Jenis kegiatan dan proyek yang di tuangkan dalam bentuk angka.
 - 4. Periode anggaran biasanya satu tahun
- b. Pendapatan daerah adalah segenap penerimaan dalam satuan uang yang masuk kas daerah diatur dan peraturan daerah dan dipergunakan untuk menutupi pengeuaran daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan sah
- c. Pendapatan asli daerah merupakan sumber – sumber keuangan pemerintah daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan dinyatakan dalam satuan uang serta pelaksanaannya diatur dengan peraturan daerah.
- d. Realisasi penerimaan PAD adalah sejumlah dana rill yang dapat dicapai selama satu periode dari pos PAD.
- e. Target penerimaan PAD adalah sejumlah dana yang hendak dicapai dalam satu periode berdasarkan atas perkiraan besarnya potensi rill daerah.
- f. Bantuan pemerintah pusat adalah sejumlah dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dalam bentuk dana perimbangan, untuk membantu pelaksanaan pembangunan di daerah.
- g. Total belanja rutin adalah semua pengeluaran negara / daerah untuk membiayai tugas umum pemerintahan.

- h. Belanja pembangunan adalah semua pengeluaran negara / daerah untuk membiayai proyek pembangunan dan dirinci dalam bentuk program dan proyek.
- i. Pinjaman daerah adalah suatu transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, dalam hal ini tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.
- j. Biaya pinjaman adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh pinjaman daerah.
- k. Belanja wajib adalah belanja yang harus dipenuhi / tidak terhindarkan dalam tahun anggaran yang bersangkutan oleh pemerintah seperti belanja pegawai.
- l. Bagian daerah adalah bagian dari pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dalam pembangunan dan penerimaan sumber daya alam serta bagian daerah lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Perusahaan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar. Dalam pelaksanaan dan implementasi program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 75 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan pendapatan, keuangan dan aset daerah. Badan pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah memiliki beberapa kedudukan.

2. Lokasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar terletak di Jalan Merdeka No.105 Kota Blitar Jawa Timur.

3. Analisis Penelitian dan Pembahasan

a. Analisis Kinerja Pendapatan Daerah

1. Analisis Varians Pendapatan

Tabel 4.1 Varians Pendapatan Kota Blitar Tahun 2011-2015

Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih	%	Kinerja
2011	521.901.397.176	525.195.227.161	3.293.829.985	100,63	Baik
2012	523.933.790.906	524.713.560.207	779.769.301	103,58	Baik
2013	600.642.893.951	612.551.692.285	11.908.798.334	101,98	Baik
2014	683.354.098.925	703.295.836.804	19.941.737.880	102,92	Baik
2015	769.104.959.708	769.743.723.207	638.763.499	108,08	Baik

Sumber: Data yang telah diolah, 2017

Perhitungan Varians pendapatan menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan yang telah ditargetkan dari tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun ajaran

2015. Dilihat dari analisis varians pendapatan, pada tahun 2011-2013 realisasi pendapatan yang dicapai oleh pemerintah Kota Blitar dinilai baik karena realisasi anggaran pendapatan yang bisa dicapai melebihi anggaran atau target yang ditetapkan. Akan tetapi di tahun 2014 dilihat dari varians anggaran pendapatan, kinerja pemerintah Kota Blitar dinilai kurang baik karena pada tahun tersebut pemerintah daerah tidak mampu mencapai anggaran atau target pendapatan yang telah ditetapkan.

2. Analisis Rasio Pendapatan

1. Rasio Derajat Desentralisasi

Tabel 4.2 Rasio Derajat Desentralisasi Kota Blitar Tahun 2011-2015

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio derajat Desentralisasi (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
2011	54.018.529.211	521.901.397.176	10,35	Kurang
2012	55.966.506.013	523.933.790.906	10,68	Kurang
2013	61.342.371.370	600.642.893.951	10,21	Kurang
2014	85.721.323.251	683.354.098.924	12,54	Kurang
2015	100.056.657.160	769.104.959.708	13,00	Kurang

Sumber: Data yang telah diolah, 2017

Pada perhitungan rasio derajat desentralisasi dalam tabel diatas, di tahun 2011 derajat desentralisasi sebesar 10,35% kemudian mengalami peningkatan di tahun 2012 menjadi 10,68%. Akan tetapi di tahun 2013 mengalami penurunan dimana derajat desentralisasinya sebesar 10,21%. Di tahun 2014-2015 derajat desentralisasi di Kota Blitar kembali mengalami peningkatan dimana jumlah derajat desentralisasinya menjadi 12,54% di tahun 2014 dan 13,00% di tahun 2015.

Secara keseluruhan rata-rata derajat desentralisasi di Kota Blitar dari tahun 2011-2015 sebesar 11,36% yang artinya kontribusi Pendapatan Asli Daerah dari Total Pendapatan Daerah masih kurang.

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 4.3 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Blitar Tahun 2011-2015

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
2011	54.018.529.211	430.634.957.365	12,54	Instruktif
2012	55.966.506.013	374.005.599.981	14,97	Instruktif
2013	61.342.371.370	58.978.981.000	14,05	Instruktif
2014	85.721.323.251	597.632.775.673	14,34	Instruktif
2015 ^{Su}	100.056.657.160	669.048.303.548	15,00	Instruktif

mber: Data yang telah diolah, 2017

Berdasarkan tabel di atas mengenai perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah di Kota Blitar di tahun 2011 jumlahnya sebesar 12,54 meningkat di tahun 2012 menjadi 14,97%. Akan tetapi di tahun 2013 mengalami penurunan tingkat kemandiriannya dimana jumlahnya sebesar 14,05%. Kemudian meningkat kembali di tahun 2014 dan tahun 2015 yang masing – masing sebesar 14,34% dan 15,00%. Secara keseluruhan dilihat dari presentasi kemandirian keuangan daerah pola hubungan di Kota Blitar adalah pola hubungan instruktif. Pola hubungan instruktif artinya peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).

3. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Tabel 4.4 Rasio Pertumbuhan Pendapatan Kota Blitar Tahun 2011-2015

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Pertumbuhan (%)	Realisasi TPD	Pertumbuhan (%)
2011	52.564.078.517	-	525.195.227.161	-
2012	63.640.945.388	21,07	542.713.560.207	6,94
2013	72.853.545.667	14,48	612.551.692.285	12,86
2014	102.757.907.576	46,99	703.295.836.804	14,81
2015	121.264.917.467	18,01	769.743.723.207	9,44

Sumber: Data yang telah diolah, 2017

Pada tabel diatas mengenai perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan dapat dilihat pertumbuhan pendapatan daerah di Kota Blitar Tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun 2015 pertumbuhannya positif. Pertumbuhan pendapatan di tahun 2012 sebesar 21,07% untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 6,94% untuk Total Pendapatan Daerah (TPD). Kemudian pertumbuhan PAD di tahun 2012 sebesar 14,48% sedangkan untuk pertumbuhan TPD pertumbuhannya sebesar 12,89%. Untuk pertumbuhan pendapatan di tahun 2014 pertumbuhannya sebesar 46,99% pada PAD dan 14,81% pada TPD. Selanjutnya pertumbuhan PAD di

tahun 2015 sebesar 18,01% sedangkan pertumbuhan TPD pertumbuhannya sebesar 9,44%.

b. Analisis Kinerja Belanja Daerah

1. Analisis Varians Belanja

Tabel. 4.5 Varians Belanja Kota Blitar Tahun 2011-2015

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Varians (Rp)	%	Kinerja
2011	521.901.397.176	525.195.227.161	3.293.829.985	100,63	Baik
2012	523.933.790.906	542.713.560.207	18.779.769.301	103,58	Baik
2013	600.642.893.951	612.551.692.285	11.908.798.334	101,98	Baik
2014	683.354.098.924	703.295.836.804	19.941.737.880	102,92	Baik
2015	769.104.960.708	769.743.723.207	638.762.499	100,08	Baik

Sumber: Data yang telah diolah, 2017

Dari tabel diatas, mengenai analisis varians belanja pemerintah daerah Kota Blitar dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dinilai baik. Dimana di tahun 2011 pemerintah daerah menggunakan 100,63% dari jumlah anggaran yang ditetapkan. Di tahun 2011 pemerintah daerah menggunakan 103,58% dari jumlah anggaran yang ditetapkan. Kemudian di tahun 2012 pemerintah daerah menggunakan 101,98 dari jumlah anggaran yang ditetapkan. Di tahun 2013 pemerintah daerah menggunakan 102,92% dari jumlah anggaran yang ditetapkan. Kemudian di tahun 2015 pemerintah daerah menggunakan 100,08 % dari jumlah anggaran yang ditetapkan.

2. Analisis Kecerassian Belanja

Tabel. 4.6 Rasio Belanja Modal dan Belanja Operasional Kota Blitar Tahun 2011-2015.

Tahun	Total Belanja (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Operasional	Rasio Belanja Modal (%)	Rasio Belanja Operasional (%)
2011	525.195.227.161	176.303.864.006	373.494.876.073	33,57	71,12
2012	542.713.560.207	99.769.462.406	176.303.869.006	18,38	32,49
2013	612.551.692.285	129.484.398.405	519.545.149.284	21,14	73,87
2014	703.295.836.804	156.383.128.241	588.179.294.915	22,24	83,63
2015	769.743.723.207	202.009.263.635	671.520.526.137	26,24	87,24

Sumber: Data yang telah diolah, 2017

Berdasarkan tabel diatas dari tahun 2011-2015 pemerintah Kota Blitar Mengalokasikan anggaran belanja daerahnya untuk keperluan belanja operasional sebesar 71,12% dari total anggaran belanja sedangkan untuk belanja modal jumlahnya 21,14% dari total anggaran belanja. Untuk tahun 2012 belanja operasional sebesar 32,49% dari total anggaran belanja sedangkan untuk belanja modal jumlahnya 18,38% dari total anggaran belanja. Kemuadian pada tahun 2013 pemerintah daerah menggunakan 73,87% dari total anggaran belanja

daerah untuk belanja operasional sedangkan untuk belanja modal digunakan 21,14% dari total anggaran belanja. Di tahun 2014 jumlah belanja operasional sebesar 83,63% dari total anggaran belanja daerah sedangkan anggaran untuk belanja daerah sebesar 22,24% dari total anggaran. Kemudian untuk tahun 2015 pemerintah daerah menggunakan 87,24% dari total anggaran belanja untuk belanja modal digunakan 26,24% dari total anggaran belanja.

3. Analisis Efisiensi Belanja

Tabel 4.7 Rasio efisiensi Belanja di Kota Blitar Tahun 2011-2015

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Rasio Efisiensi (%)
2011	550.548.740.079	533.328.191.460	96,87
2012	544.445.039.499	518.217.383.008	95,18
2013	649.994.547.698	549.594.934.114	84,55
2014	745.312.423.156	659.079.331.972	88,43
2015	873.733.189.772	782.148.792.596	89,52

Sumber: Data yang telah diolah, 2017

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi belanja yang terdapat pada tabel diatas menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kota Blitar dari segi efisiensi belanja dalam waktu lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2011 sampai dengan 2015 telah melakukan kinerja yang efisien. Dimana tahun 2011 jumlah realisasi belanja sebesar 96,87% dari jumlah keseluruhan anggaran belanja di tahun tersebut. Kemudian di tahun 2012 pemerintah Kota Blitar realiasi belanjanya lebih sedikit dari tahun sebelumnya yaitu berjumlah 95,18% dari total keseluruhan anggaran belanja. Untuk tahun 2013 presentase efisiensi belanja mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dimana anggaran di Kota Blitar di tahun 2013 sebesar 84,55% dari total keseluruhan anggaran belanja. Di tahun 2014 dan 2015 pemerintah lebih efisien dalam merealisasikan belanja daerahnya di tahun 2014-2015 berturut – turut sebesar 88,43% dan 89,52 dari total anggaran belanja.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisis Pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2014-2015 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- Pada tahun 2011 derajat desentralisasi sebesar 10,35% kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2012 menjadi 10,68%, akan tetapi pada tahun 2013 mengalami penurunan dimana derajat desentralisasinya sebesar 10,21%. Sementara tahun 2014-2015 kembali mengalami peningkatan menjadi 12,54% pada tahun 2014 dan 13,00% pada tahun 2015. Secara keseluruhan rata-rata derajat desentralisasi dari tahun 2011-2015 sebesar 11,36% yang artinya kontribusi Pendapatan Asli

Daerah dari Total Pendapatan Daerah masih kurang. Jadi dilihat dari rasio daerah desentralisasi termasuk dalam kategori kurang.

- b. Pada tahun 2011 rasio kemandirian keuangan daerah jumlahnya sebesar 12,54 meningkat pada tahun 2012 menjadi 14,97%, akan tetapi pada tahun 2013 mengalami penurunan tingkat kemandiriannya dimana jumlahnya sebesar 14,05%. Kemudian meningkat kembali pada tahun 2014 dan tahun 2015 yang masing – masing sebesar 14,34% dan 15,00%. Secara keseluruhan dilihat dari presentasi kemandirian keuangan daerah pola hubungan di Kota Blitar adalah pola hubungan instruktif berarti peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian daerah atau daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah.
- c. Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 rasio pertumbuhan pendapatan pada tahun 2012 sebesar 21,07% untuk pendapatan asli daerah (PAD) dan 6,94% untuk total pendapatan daerah (TPD). Kemudian pertumbuhan PAD pada tahun 2012 sebesar 14,48% sedangkan untuk pertumbuhan TPD pertumbuhannya sebesar 12,89%. Untuk pertumbuhan pendapatan pada tahun 2014 pertumbuhannya sebesar 46,99% pada PAD dan 14,81% pada TPD. Selanjutnya pertumbuhan PAD pada tahun 2015 sebesar 18,01% sedangkan pertumbuhan TPD pertumbuhannya sebesar 9,44%. Dilihat dari pertumbuhan pendapatan dikategorikan pertumbuhannya positif karena pemerintah daerah mampu mempertahankan bahkan meningkatkan pencapaian dari tahun sebelumnya.

2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, ternyata masih terdapat banyak keterbatasan. Oleh karena itu, berikut ini adalah saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya. Dari simpulan diatas disarankan kepada pemerintah daerah Kota Blitar untuk :

- a. Memaksimalkan semua sumber pendapatan asli daerah, dana perimbangan, maupun lain – lain pendapatan daerah yang sah agar tetap bisa memenuhi semua kebutuhan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di Kota Blitar.
- b. Tetap memaksimalkan sumber pendapatan asli daerah. Dengan lebih memaksimalkan potensi yang ada pada sektor – sektor tertentu, yang kedepannya pemerintah daerah Kota Blitar bisa secara perlahan mengurangi ketergantungan terhadap sumber dana yang berasal dari pihak ekstern.
- c. Sebaiknya pemerintah daerah tetap meningkatkan realisasi belanja dalam hal belanja modal dan mengefesiesikan belanja dalam hal belanja operasional.

DAFTAR PUSTAKA

“Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012”. Skripsi.PDF

- Assidiqi, Bahrin. 2014. "Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012". FE Jurusan Pendidikan Akuntansi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Barata, Atep Adya dan Trihartono, Bambang. 2004. "Kekuasaan Pengelola Keuangan Negara/Daerah". PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Candra Saputra, Sandy. 2016. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Jember tahun 2010 – 2014". Jurusan Manajemen. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Deskripsi Dan Analisis APBD 2104.skripsi. PDF
- Faisal H. Basri, S.E., M.A, 1995, *Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI*, Erlangga, Depok.
- file:///G:/1422%20pdf.pdf
- Kansil dan Kansil, Cristine, 2004, "*Pemerintah Daerah di Indonesia cetakan pertama*". Jakarta: Sinar Grafika.
- Khalikussabir. 2004. "Analisis Rasio Keuangan APBD untuk menilai kinerja keuangan (Studi kasus Pada Pemerintahan Kota dan Kabupaten Malang)". FE. Universitas Islam Malang.
- Khasanah, Mufidhatul. 2007. "Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD): Kasus APBD Kabupaten Sleman dan Kulon Progo Tahun 2004 dan 2005". JEMA. Volume XVII. FE Universitas Islam Malang.
- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. PDF.
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2011. Buku 1. 2012. Badan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Profinsi Jawa Timur.
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2012. Buku 1. 2013. Badan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Profinsi Jawa Timur.
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2013. Buku 1. 2014. Badan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Profinsi Jawa Timur.
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2014. Buku 1. 2015. Badan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Profinsi Jawa Timur.
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2015. Buku 1. 2016. Badan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Profinsi Jawa Timur.
- Sahudi. 2006. Analisis Rasio Keuangan APBD untuk menilai kinerja keuangan (Studi kasus Pada Pemerintahan Kota dan Kabupaten Malang). FE. Universitas Islam Malang.
- Mufida, Asma. 2017. "Analisis Pengaruh Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang (Studi

- Kasus Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang). FE. Universitas Islam Malang.
- Yuwono, Sony dkk. 2008. Memahami APBD dan permasalahannya (Panduan Pengelola Keuangan Daerah). Malang. Bayumedia Publishing.
- Widjaja. 2007. Otonomi daerah dan Daerah Otonomi. Jakarta. PT. Grafindo Persada.
- Widjaja. 2005. Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada.
- <http://datarental.blogspot.co.id/2016/04/prinsip-prinsip-penyelenggaraan-otonomi.html>
- <http://eprints.undip.ac.id/26411/2/jurnal.pdf>
- <http://kholifalilik.blogspot.in/p/definisi-operasional-variabel.html>
- <http://prahesti10411084.blogspot.com/2012/01/makalah-subyek-dan-obyek-penelitian.html>
- <https://www.scribd.com/doc/193449064/Analisis-Kinerja-Anggaran-Pendapatan-Dan-Belanja-Kabupaten-APBK-Pemerintah-Daerah-Kabupaten-Pidie>

*) Adrika Fardisa Maskuna adalah Alumni Fakultas Ekonomi Unisma

**) Abdul Qodir Djaelani, Dosen tetap Fakultas Ekonomi Unisma

***) Muhammad Khoirul ABS, Dosen tetap Fakultas Ekonomi Unisma